

Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Pekalongan

Fatra Azzarohma¹, Banu Witono²

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja keuangan pada Kabupaten Pekalongan. Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan visi dan misi organisasi yang tertuang dalam proses perumusan strategis suatu organisasi. Dan penilaian kinerja merupakan suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas. Hasil analisis menunjukkan bahwa ; kinerja keuangan yang diwakili oleh analisis varians untuk pendapatan dan belanja dapat dikatakan baik. Kemudian kinerja keuangan dilihat dari Analisis pertumbuhan pendapatan dan belanja dikategorikan pertumbuhannya positif. Dalam hal Rasio keserasian belanja pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan lebih besar mengalokasikan belanjanya untuk belanja operasi. Dan kinerja keuangan jika dilihat dari Analisis Rasio Keuangan menunjukkan hasil bahwa kemandirian daerahnya rendah. Sedangkan dalam hal Rasio efektifitas Kabupaten Pekalongan dapat dikategorikan efektif. Dan jika dilihat dari Rasio efisiensi Kabupaten Pekalongan dikategorikan tidak efisien. Disimpulkan secara keseluruhan kinerja keuangan Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2017 - 2021 masih belum cukup baik. Untuk itu Pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan hendaknya berusaha mencapai target pendapatan sehingga kemandirian daerah bisa lebih baik.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Anggaran, Belanja, Pendapatan

Abstract

This study aims to assess the financial performance of Pekalongan Regency. Performance is a picture of the level of achievement of the implementation of an activity or policy in realizing the goals, objectives, vision and mission of the organization contained in the strategic formulation process of an organization. And performance appraisal is a management tool to improve quality. The results of the analysis show that; financial performance represented by analysis of variance for income and expenditure can be said to be good. Then the financial performance seen from the analysis of income and spending growth is categorized as positive growth. In terms of spending compatibility ratio, the regional government of Pekalongan Regency allocates more of its expenditure for operating expenditures. And the financial performance when viewed from the Financial Ratio Analysis shows the result that the regional independence is low. Meanwhile, in terms of effectiveness ratio, Pekalongan Regency can be categorized as effective. And when viewed from the efficiency ratio of Pekalongan Regency it is categorized as inefficient. It was concluded that overall the financial performance of Pekalongan Regency for the 2017 - 2021 Fiscal Year is still not good enough. For this reason, the local government of Pekalongan Regency should try to achieve the revenue target so that regional independence can be better.

Keywords: Financial Performance, Budget, Spending, Income

Copyright (c) 2023 Reza Meilawati

✉ Corresponding author :

Email Address : b200190133@students.ums.ac.id , bw257@ums.ac.id

PENDAHULUAN

Di masa kini perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru dalam pengaplikasian pengelolaan keuangan daerah. Pengelola keuangan daerah sangat besar berpengaruh terhadap nasib suatu daerah karena dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan kebesarannya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara mengelola keuangannya (Sinaga, 2021). Peran aktif dari pemerintah daerah dalam mengelola daerah sendiri merupakan hal yang wajib dilakukan oleh pemerintah untuk membangun dan mengelola daerah masing-masing dengan baik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga dengan adanya otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah lebih mampu dalam mengelola potensi daerahnya masing-masing (Polii et al., 2020).

Desentralisasi merupakan salah satu bentuk dilaksanakannya otonomi daerah dengan harapan kemandirian daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri pembangunan daerahnya guna kesejahteraan masyarakat daerah (Setianingrum and Haryanto, 2020). Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien sehingga mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. (Maylani, 2022) Salah satu kunci penerapan otonomi daerah dan desentralisasi yang dikelola dengan hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah untuk mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengawasi dan mengatur kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Persyaratan kinerja dan akuntabilitas yang tinggi terhadap kinerja pemerintah daerah telah menyebabkan kebutuhan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah. Penilaian akuntabilitas tersebut, bukan hanya semata berbicara mengenai bagaimana pemerintah daerah mampu menyerap serta menggunakan anggaran, namun terlebih pada bagaimana pengalokasian anggaran tersebut telah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai kaidah prinsip pengalokasian anggaran yang efektif, efisien serta ekonomis. (Susanto, 2019) Pengukuran kinerja pemerintah daerah memiliki banyak tujuan, salah satunya adalah meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu mengembangkan ukuran kinerja yang baik. Ukuran kinerja digabungkan menggunakan lebih dari satu ukuran, sehingga diperlukan ukuran yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Hal inilah yang terkadang menimbulkan konflik. (Riama Anjelika Sinaga, 2021)

Eksentif penggunaan analisis kinerja keuangan sebagai alat keuangan telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas. Maka itu diperlukan suatu perubahan terkait penggunaan analisis dalam kinerja sebagai pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengukuran Kinerja Keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan cara melihat kinerjanya melalui Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya untuk suatu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran juga mengandung informasi yang bermanfaat dalam memprediksi sumber daya keuangan yang tersedia untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah pada periode berikutnya dengan menyajikan laporan secara komparatif. (Krisniawati, 2021) Pengelolaan anggaran berdasarkan kinerja ini memberikan gambaran yang lebih khusus terkait dengan kemampuan suatu daerah untuk selalu menggali potensi daerah guna

meningkatkan anggaran pendapatan, yang akan berdampak pada kemampuan penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah. (Retnowulan and Widiyanti, 2018)

Tabel. 1. Pagu dan Realisasi APBN Jawa Tengah tahun 2019 dan 2020 (dalam milliar Rupiah)

Uraian	2019			2020		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Pendapatan Negara dan Hibah	88,751	84,426	95,71 %	85,895	88,787	103,37 %
Belanja Negara	113,996	108,561	95,19 %	104,917	102,082	97,30 %
Belanja Pemerintah Pusat (BPP)	44,089	40,531	91,93 %	38,571	36,491	94,61 %
Transfer Daerah dan Dana Desa (TKDD)	69,907	67,985	97,25 %	66,346	65,591	98,86 %
Surplus/ Defisit	(25,281)	(24,090)	95,29 %	(19,022)	(13,295)	69,89 %
Pembiayaan						
SILPA/SIKPA	(25,281)			(19,022)		

Sumber: I Account APBN OMSPAN diolah, Februari 2021

Berdasarkan dari data di atas dapat diketahui Alokasi APBN di Jawa Tengah sebesar Rp104,92 triliun, turun 3,32 persen dari tahun sebelumnya, yang disebabkan karena kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian/Lembaga sebagai dampak dari penanganan dan antisipasi terhadap pandemi covid-19. Porsi TKDD terhadap APBD di wilayah Jawa Tengah mencapai 63,24 persen. Realisasi belanja tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 97,30 persen dari tahun sebelumnya 95,19 persen. Secara umum realisasi belanja pemerintah pusat di Jawa Tengah maupun transfer daerah dan dana desa diatas realisasi belanja nasional yaitu sebesar 92,51 persen. Persentase Realisasi Pendapatan Negara di Jawa Tengah tahun 2020 naik dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 100,37 persen dari 95,17 persen di tahun 2019. Persentase ini juga diatas capaian realisasi pendapatan tingkat nasional yang sebesar 96,10 persen. Kinerja penerimaan Jawa Tengah tahun 2020 tercatat positif di tengah pertumbuhan ekonomi global yang cenderung melemah akibat pendemi covid-19.

Penelitian yang dilakukan oleh Ngangi et al., (2018) menyimpulkan bahwa adanya kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2012-2016 dalam kategori sangat rendah sekali, hal ini ditunjukan dari rata-rata rasio kemandirian kurang dari 25%. Selain itu, derajat desentralisasi juga tergolong masih sangat kurang. Sedangkan efisiensi PAD berada pada kategori efisien. Bila dilihat dari rasio belanja aktivitas / kecocokan pada periode 2012-2016, Kabupaten Sorong masih memprioritaskan porsi belanja daerah untuk investasi cukup besar pada Kabupaten Sorong Selatan dan porsi belanja daerah sebagian dana dialokasikan untuk belanja modal, dan masuk dalam kategori kurang serasi. Selain pertumbuhan pendapatan asli daerah mengalami peningkatan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Dan dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Sorong Selatan pada saat itu telah mampu untuk mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan perekonomiannya dari tahun ke tahun. Selanjutnya, Sumual et al., (2017) menyimpulkan bahwa Selama tahun 2013-2016 Kota Tomohon hanya mendapatkan predikat sebagai Kota yang efektif karena banyak target yang telah dicapai, tapi untuk pertumbuhan kemandirian dan efesiensi Kota Tomohon belum memenuhi sesuai standar yang diinginkan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Pengukuran Kinerja Keuangan. Pemilihan Kabupaten Pekalongan

menjadi fokus penelitian yaitu Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam periode 2017-2021 mendapatkan predikat WTP selama 7 kali berturut-turut yang merupakan predikat tertinggi dari BPK RI. Adapun tujuan yang ingin di capai adalah untuk mengetahui dan mengkaji kinerja keuangan Kabupaten Pekalongan tahun 2017-2021.

Kinerja Keuangan

Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keseluruhan proses pengelolaan tersebut harus saling terintegrasi, berkaitan, dan dijalankan dengan sebaik mungkin untuk bisa mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Sedangkan menurut Krisniawati (2021) Kinerja keuangan merupakan suatu kegiatan untuk melakukan pelaporan keuangan menurut standar keuangan yang telah ditetapkan.

Pengukuran Kinerja Keuangan

Pengukuran kinerja (performance measurement) menurut Robertson (2002) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan ; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Sedangkan (Mahmudi, 2016) menjelaskan bahwa kinerja keuangan tercermin dari laporan keuangan neraca laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas. Laporan keuangan perlu di analisis untuk bisa memberikan gambaran kinerja keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan kegiatan untuk menginterpretasikan angka-angka dalam laporan keuangan dalam rangka menilai kinerja keuangan yang hasil analisis tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Pengukuran kinerja organisasi sektor publik menurut Mahsun Mohammad et al., (2015) meliputi aspek-aspek, antara lain:

1. Kelompok masukan (input); segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
2. Kelompok proses (process); ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
3. Kelompok keluaran (output); sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud (tangible) maupun tidak berwujud (intangible).
4. Kelompok hasil (outcome); segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung.
5. Kelompok manfaat (benefit); sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
6. Kelompok dampak (impact); pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif.

Laporan Keuangan

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1 (Revisi 2019) laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Jadi laporan keuangan merupakan salah satu informasi yang sangat penting dalam menilai perkembangan suatu entitas. Laporan keuangan dapat digunakan untuk menilai prestasi suatu perusahaan atau organisasi di masa lampau, sekarang dan rencana di masa mendatang. Mahmudi (2016) mengatakan, meskipun laporan keuangan sudah bersifat general purposive, artinya dibuat lebih umum dan sesederhana mungkin untuk memenuhi kebutuhan informasi semua pihak, tetapi tidak semua pembaca laporan dapat memahami laporan tersebut dengan

baik. Menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Analisis Laporan Keuangan

Analisis interpretasi laporan keuangan bagi mereka yang berkepentingan adalah perlu sebagai dasar pengambil keputusan, sehingga keputusan yang diambil itu tepat. Menurut Abdul (2012) Analisis laporan keuangan merupakan proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu, dengan tujuan untuk menentukan eliminasi dan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa mendatang. Menurut Kasmir (2013) dalam jurnal (Bonilisa Rantebalik et al., 2016), terdapat dua macam metode analisis laporan keuangan yang biasa dipakai yaitu sebagai berikut:

1. Analisis vertikal (statis) merupakan analisis yang dilakukan terhadap hanya satu periode laporan keuangan saja. Informasi yang diperoleh hanya untuk satu periode saja dan tidak diketahui perkembangan perusahaan dari periode ke periode.
2. Analisis horizontal (dinamis) merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Dari hasil analisis ini akan terlihat perkembangan perusahaan dari periode yang satu ke periode yang lain.

Analisis Keuangan Daerah

Analisis Kinerja Keuangan menurut Mahmudi (2007), sebagai berikut:

1. Analisis Varians

a. Analisis Varians Pendapatan

Analisis varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan.

$$\text{Varians Pendapatan} = \text{Realisasi} - \text{Anggaran Pendapatan}$$

b. Analisis Varians Belanja

Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi dengan anggaran.

$$\text{Varians Belanja} = \text{Realisasi} - \text{Anggaran Belanja}$$

2. Analisis Keserasian Belanja

Analisis ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja secara optimal. Analisis keserasian belanja antara lain berupa :

a. Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

$$\text{Belanja Operasi terhadap Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

b. Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja

$$\text{Belanja Modal terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

3. Analisis Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah desa dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif.

Rumus rasio pertumbuhan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Pendapatan } X_{n-1}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja } X_{n-1}} \times 100\%$$

4. Analisis Rasio Keuangan

a. Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

b. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah daerah yang diukur dengan membandingkan realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan, dalam satuan persen. (Krisniawati, 2021)

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

c. Rasio Efisiensi

Kinerja keuangan pemerintahan daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi keuangan daerah berarti kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif bermaksud untuk memberikan gambaran mengenai suatu gejala sosial tertentu yang menjadi fokus perhatian yang ingin dijelaskan. Jenis penelitian deskriptif bertujuan membuat deskripsi secara sistematis tentang fakta-fakta dan fenomena-fenomena dari objek yang diteliti. Jenis data dalam penelitian ini adalah data data kuantitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk angka - angka yang tersaji dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan. Data tersebut diakses dari website resmi Kabupaten Pekalongan <http://bpkd.pekalongankab.go.id>. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan (Bonilisa Rantebalik et al., 2016) untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2017 sampai 2021, maka dilakukan pengujian berdasarkan analisis varians, analisis keserasian belanja, analisis pertumbuhan dan analisis rasio keuangan untuk mengukur tingkat kinerja keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Varians Pendapatan

Rasio ini menunjukkan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah dapat dinilai baik kinerja pendapatannya apabila realisasi pendapatannya tidak melebihi target yang telah ditetapkan. Sebaliknya jika realisasi pendapatan lebih besar dari jumlah yang dianggarkan maka hal itu mengindikasikan adanya kinerja pendapatan yang kurang baik.

Hasil dari perhitungan analisis varians pendapatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. Analisis Varians Pendapatan

Tahun	Realisasi	Anggaran	Varians	Persentase
2017	Rp. 2.067.907.851.794	Rp. 2.076.035.321.293	Rp. 8.127.469.499	99,61%
2018	Rp. 2.101.449.302.497	Rp. 2.176.551.072.207	Rp. 75.101.769.710	96,55%
2019	Rp. 2.182.770.952.456	Rp. 2.288.761.562.831	Rp. 105.990.610.375	95,37%
2020	Rp. 2.061.798.474.096	Rp. 2.128.970.335.691	Rp. 67.171.861.595	96,84%
2021	Rp. 2.078.543.512.922	Rp. 2.087.311.015.279	Rp. 8.767.502.357	99,58%

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti 2023.

Pada tabel diatas memperlihatkan pada tahun 2017 persentase anggaran terealisasi 99,61% dari total anggaran pendapatan. Untuk tahun 2018 menunjukkan persentase anggaran terealisasi 96,55%, tahun 2019 persentase realisasi anggaran sebesar 95,37%, selanjutnya pada tahun 2020 persentase realisasi anggaran sebesar 96,84% dan tahun 2021 menunjukkan bahwa persentase anggaran terealisasi sebesar 99,58% sampai dengan tahun 2021 varian pendapatan menunjukan angka persentase yang cukup baik. Dalam hal ini berarti bahwa Kabupaten Pekalongan telah memanfaatkan anggaran pendapatan dengan baik dimana realisasi pendapatan yang telah dilakukan lebih kecil dari anggaran yang telah direncanakan.

Analisis Varians Belanja

Rasio ini menunjukkan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah dapat dinilai baik kinerja pendapatannya apabila realisasi belanjanya tidak melebihi target yang telah ditetapkan. Sebaliknya jika realisasi belanja lebih besar dari jumlah yang dianggarkan maka hal itu mengindikasikan adanya kinerja belanja yang kurang baik.

Hasil dari perhitungan analisis varians belanja dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. Analisis Varians Belanja

Tahun	Realisasi	Anggaran	Varians	Persentase
2017	Rp. 2.037.699.968.644	Rp. 2.275.684.213.022	Rp. 238.083.244.378	89,54%
2018	Rp. 2.160.744.430.323	Rp. 2.406.643.199.984	Rp. 245.898.769.661	89,78%
2019	Rp. 2.183.534.790.005	Rp. 2.449.343.147.800	Rp. 265.808.357.795	89,15%
2020	Rp. 2.053.017.711.594	Rp. 2.283.826.930.634	Rp. 230.809.219.040	89,89%
2021	Rp. 2.075.043.160.173	Rp. 2.245.070.775.156	Rp. 170.027.614.983	92,43%

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti 2023.

Pada tabel diatas memperlihatkan pada tahun 2017 persentase anggaran terealisasi 89,54% dari total anggaran belanja. Untuk tahun 2018 menunjukkan presentase anggaran terealisasi 89,78%, tahun 2019 persentase realisasi anggaran sebesar 89,15%, selanjutnya pada tahun 2020 persentase realisasi anggaran sebesar 89,89% dan tahun 2021 menunjukkan bahwa persentase anggaran terealisasi sebesar 92,43% sampai dengan tahun 2021 varian belanja menunjukan angka persentase yang cukup baik. Dalam hal ini berarti bahwa Kabupaten Pekalongan telah memanfaatkan anggaran belanja dengan baik dimana realisasi belanja yang telah dilakukan lebih kecil dari anggaran yang telah direncanakan.

Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal.

Hasil dari perhitungan Rasio Keserasian dapat dilihat pada tabel Dan tabel di bawah ini :

Tabel 4. Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

Tahun	Total Belanja Operasi	Realisasi	Varians	Persentase
2017	Rp. 1.318.662.172.061	Rp. 2.037.699.968.644	Rp. 238.083.244.378	89,54%
2018	Rp. 1.385.548.638.839	Rp. 2.160.744.430.323	Rp. 245.898.769.661	89,78%
2019	Rp. 1.144.899.258.407	Rp. 2.183.534.790.005	Rp. 265.808.357.795	89,15%
2020	Rp. 1.422.244.906.789	Rp. 2.053.017.711.594	Rp. 230.809.219.040	89,89%
2021	Rp. 1.486.225.964.139	Rp. 2.075.043.160.173	Rp. 170.027.614.983	92,43%

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti 2023.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas diketahui bahwa rata-rata Rasio Keserasian Belanja Operasi Kabupaten Pekalongan 67,15%. Dimulai pada tahun 2017 di mana rasio nya sebesar 64,72% turun di tahun 2018 menjadi 64,12%, dan mengalami peningkatan lagi menjadi 66,04% pada tahun 2019. Tahun 2020 juga mengalami peningkatan menjadi 69,28%, dan di tahun 2021 kembali meningkat menjadi 71,62%.

Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Tabel 5. Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Tahun	Total Belanja Modal	Realisasi	Varians	Persentase
2017	Rp. 336.815.933.533	Rp. 2.037.699.968.644	Rp. 238.083.244.378	16,53%
2018	Rp. 431.412.970.525	Rp. 2.160.744.430.323	Rp. 245.898.769.661	19,97%
2019	Rp. 345.165.297.652	Rp. 2.183.534.790.005	Rp. 265.808.357.795	15,81%
2020	Rp. 239.471.535.400	Rp. 2.053.017.711.594	Rp. 230.809.219.040	11,66%
2021	Rp. 208.046.317.066	Rp. 2.075.043.160.173	Rp. 170.027.614.983	10,03%

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti 2023.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 5. di atas diketahui bahwa rata-rata Rasio Kecerasan Belanja Modal Kabupaten Pekalongan 14,8%. Dimulai pada tahun 2017 dimana rasio nya sebesar 16,53% mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi 19,97%, dan mengalami penurunan menjadi 15,81% pada tahun 2019. Tahun 2020 juga mengalami penurunan menjadi 11,66%, dan terus mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 10,03%.

Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Rasio pertumbuhan (growth ratio) menunjukkan seberapa baik pemerintah daerah telah mampu mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan realisasi anggaran dari satu periode ke periode berikutnya. Potensi mana yang perlu mendapat perhatian dapat dinilai dengan memahami pertumbuhan masing-masing komponen sumber pendapatan dan belanja.

Tabel 6. Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Tahun	Total Pendapatan	Total Pendapatan (tahun n-1)	Selisih	Persentase
2017	Rp. 2.067.907.851.794	Rp. 1.787.351.674.573	Rp. 280.556.177.220	15,70%
2018	Rp. 2.101.449.302.497	Rp. 2.067.907.851.794	Rp. 33.541.450.703	1,62%
2019	Rp. 2.182.770.952.456	Rp. 2.101.449.302.497	Rp. 81.321.649.958	3,87%
2020	Rp. 2.061.798.474.096	Rp. 2.182.770.952.456	(Rp. 120.972.478.359)	-5,54%
2021	Rp. 2.078.543.512.922	Rp. 2.061.798.474.096	Rp. 8.767.502.357	0,81%

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti 2023.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan pertumbuhan pendapatan Kabupaten Pekalongan bersifat fluktuatif, pada tahun 2017 yaitu sebesar 15,70% yang selanjutnya pada tahun 2018 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi sebesar 1,62%, namun pada tahun 2018-2019 mengalami kenaikan sebesar 3,87%. Di tahun 2020 pertumbuhan pendapatan kembali mengalami penurunan signifikan hingga menyentuh angka -5,54% dan di tahun 2021 kembali naik menjadi 0,81%. Setiap tahun anggaran dalam penelitian pemerintah Kabupaten Pekalongan masih belum mampu dalam meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerah jika dilihat dari grafik tersebut. Hal ini dapat terjadi akibat dari rendahnya pengelolaan pendapatan yang berujung pada ketergantungan pemerintah Kabupaten Pekalongan kepada dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Analisis Pertumbuhan Belanja

Rasio ini menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah dapat mempertahankan dan meningkatkan belanja daerahnya dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan demi kepentingan pembangunan dan pelayanan public. Adapun rasio pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Pekalongan berdasarkan dari rumus yang telah disebutkan dan menghasilkan presentase sebagai berikut:

Tabel 7. Analisis Pertumbuhan Belanja

Tahun	Total Belanja (tahun n)	Total Belanja (tahun n-1)	Varians	Persentase
2017	Rp. 2.037.699.968.644	Rp 1.804.967.596.944	Rp. 238.083.244.378	12,89%
2018	Rp. 2.160.744.430.323	Rp. 2.037.699.968.644	Rp. 245.898.769.661	6,04%

2019	Rp. 2.183.534.790.005	Rp. 2.160.744.430.323	Rp. 265.808.357.795	1,05%
2020	Rp. 2.053.017.711.594	Rp. 2.183.534.790.005	Rp. 230.809.219.040	-5,98%
2021	Rp. 2.075.043.160.173	Rp. 2.053.017.711.594	Rp. 170.027.614.983	1,07%

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti 2023.

Hasil perhitungan rasio pertumbuhan belanja daerah di Kabupaten Pekalongan dapat menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja yang menurun dari tahun 2017 ke tahun 2020 kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2021 diangka yang menunjukkan positif menjadi sebesar 1,07%.

Analisis Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Hasil dari perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 8. Analisis Rasio Kemandirian

Tahun	PAD	Pendapatan Transfer	Rasio Kemandirian	Persentase
2017	Rp. 305.394.299.061	Rp. 1.740.112.746.919	17,55%	Instruktif
2018	Rp. 311.288.143.682	Rp. 1.288.217.218.488	24,16%	Instruktif
2019	Rp. 341.344.415.575	Rp. 1.749.813.235.371	19,51%	Instruktif
2020	Rp. 341.901.469.549	Rp. 1.358.545.060.957	25,17%	Konsultatif
2021	Rp. 346.599.468.113	Rp. 1.634.957.101.107	21,20%	Instruktif

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti 2023.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas kemampuan keuangan Kabupaten Pekalongan tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk pola hubungan instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Nilai terendah terjadi pada tahun 2017 dimana nilainya sebesar 17,55% dan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 25,17% (Konsultatif). Sedangkan tahun tahun lainnya yaitu tahun 2018, 2019, dan 2021 masing-masing sebesar : 24,16%, 19,51%, dan 21,20%. Hal ini menunjukan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak ekstern (terutama bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi) masih sangat tinggi.

Analisis Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

Hasil dari perhitungan Rasio Efektivitas PAD dapat dilihat pada tabel 9. di bawah ini:

Tabel 9. Analisis Rasio Efektivitas

Tahun	Realisasi PAD	Anggaran PAD	Rasio Efektivitas	Persentase
2017	Rp. 305.394.299.061	Rp. 300.887.832.132	101,50%	Sangat Efektif
2018	Rp. 311.288.143.682	Rp. 369.095.235.409	84,34%	Cukup Efektif
2019	Rp. 341.344.415.575	Rp. 408.032.305.251	83,66%	Cukup Efektif
2020	Rp. 341.901.469.549	Rp. 378.788.767.484	90,26%	Efektif
2021	Rp. 346.599.468.113	Rp. 339.693.849.261	102,03%	Sangat Efektif

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti 2023.

Berdasarkan perhitungan pada tabel 9. di atas dapat diketahui bahwa Efektivitas Keuangan Kabupaten Pekalongan pada tahun 2018 dan 2019 cukup efektif, karena nilai yang diperoleh masih di bawah 90% yaitu 84,34% dan 83,66%. Di tahun 2020 efektivitas menyentuh angka 90,26% yang artinya efektif. Untuk tahun 2017 dan 2021 sudah sangat efektif karena nilai yang diperoleh sudah lebih dari 100% yaitu 101,50% dan 102,03%.

Analisis Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Hasil dari perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel 10 di bawah ini :

Tabel 10. Analisis Rasio Efisiensi

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	Rasio Efisiensi	Persentase
2017	Rp. 2.037.699.968.644	Rp. 2.067.907.851.794	98,53%	Kurang Efisien
2018	Rp. 2.160.744.430.323	Rp. 2.101.449.302.497	102,82%	Tidak Efisien
2019	Rp. 2.183.534.790.005	Rp. 2.182.770.952.456	100,03%	Tidak Efisien
2020	Rp. 2.053.017.711.594	Rp. 2.061.798.474.096	99,57%	Kurang Efisien
2021	Rp. 2.075.043.160.173	Rp. 2.078.543.512.922	99,83%	Kurang Efisien

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti 2023.

Berdasarkan perhitungan pada tabel 10. di atas Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan pada tahun 2018 dan 2019 tergolong tidak efisien karena nilai rasionya sudah di atas 100%. Total belanjanya melebihi total pendapatan daerah. Pada tahun 2017, 2020 dan 2021 efisiensinya tergolong Kurang Efisien yaitu sebesar 98,53%, 99,57% dan 99,83%. Hal ini diakibatkan terjadinya selisih yang cukup besar antara pendapatan dengan belanja.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja keuangan Kabupaten Pekalongan periode tahun 2017 hingga 2021. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Kinerja Keuangan Kabupaten Pekalongan jika dilihat dari Analisis Varians Pendapatan Daerah, secara umum dapat dikatakan cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan target anggaran pendapatan dari tahun 2017 - 2021 mempunyai angka rata-rata 97,59%.
2. Kinerja Keuangan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pekalongan dilihat dari Analisis Varians Belanja Daerah secara umum Kinerja Keuangan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pekalongan dapat dikatakan baik karena dari tahun 2017-2021 tidak ada yang melebihi dari anggaran belanja hal ini mengindikasikan adanya efisiensi

atau penghematan anggaran.

3. Analisis Kesenjangan Belanja Daerah Dari Analisis Kesenjangan Belanja Daerah, secara umum terlihat bahwa sebagian besar dana yang dialokasikan dari total belanja lebih besar untuk belanja operasional dibandingkan belanja modal sehingga rasio belanja modal relatif lebih kecil.
4. Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Pekalongan dilihat dari Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2017 - 2021 cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan yang positif yaitu 3,29 %. Kecenderungan mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dari tahun ke tahun karena pertumbuhan Dana Perimbangan yang juga fluktuatif.
5. Kinerja Keuangan Belanja Daerah dilihat dari Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan menunjukkan pertumbuhan yang positif. Kecenderungan pertumbuhan belanja Pemda Kabupaten Pekalongan tahun 2017 - 2021 adalah fluktuatif. Hal ini wajar terjadi karena beberapa faktor yaitu pengeluaran untuk gaji pegawai yang terus naik dari setiap tahunnya, serta tingkat inflasi pada tahun berjalan.
6. Kinerja keuangan Daerah dilihat dari rata-rata rasio kemandirian Kabupaten Pekalongan dalam 5 tahun anggaran yaitu 21,52% dimana kriterianya tergolong rendah.
7. Kinerja Keuangan Daerah dilihat dari rata-rata rasio efektifitas Kabupaten Pekalongan dalam 5 tahun anggaran yaitu 92,36% dimana kriterianya tergolong efektif.
8. Kinerja Keuangan Daerah dilihat dari rata-rata rasio efisiensi Kabupaten Pekalongan dalam 5 tahun anggaran yaitu 100,156% dimana kriterianya tergolong tidak efisien.

Referensi :

- Abbas Tashakkori and Charles Teddlie, 2010, *Mixed Methodologi (Mengkombinasikan Pendekatan Kualitas dan Kuantitas)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Abdul H., 2012, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, keempat., Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Ali Maksum, 2012, *Metodologi Penelitian dalam Olahraga*, Unesa University Press, Surabaya.
- Arikunto S., 2016, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bonilisa Rantebalik, Tawakkal and Anna Sutrisna S, 2016, *ANALISIS KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA*,
- Dwiastuti M.M.P. and Supardi, 2021, *ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015-2019*, , Vol.12, 1-13.
- Fajriansyah Y., Elim I. and Walandouw S.K., 2019, Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran 2016-2017, *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 7 (3), 4465-4474.
- Harahap H.F., 2020, Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4 (1), 34.
- Harahap S.S., 2013, *Analisa Kritis atas Laporan Keuangan*, PT Raja Grafindo Persada., Jakarta.
- Krisniawati K., 2021, *ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN ACEH TIMUR*, *Ihtiyath : Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 5 (1)
- Mahmudi, 2016, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahsun Mohammad, Firma Sulistyowati and Heribertus Andre Purwanugraha, 2015, *Akuntansi Sektor Publik*, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.
- Maylani D.A., 2022, *ANALISIS LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH*, , 11 (1)
- Ngangi A.I., Murni S. and Untu V.N., 2018, *ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SORONG SELATAN FINANCIAL PERFORMANCE*

- ANALYSIS OF SOUTH SORONG REGENCY GOVERNMENT, *Analisis Kinerja*,.... 4103
Jurnal EMBA, 6 (4), 4103–4112.
- Palimbongan R.R., 2019, Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon, *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 7 (4), 4888–4897.
- Polii I., Saerang D., Tangkuman S., A Polii I.R., E Saerang D.P., Tangkuman S.J., Akuntansi J. and Ekonomi dan Bisnis F., 2020, UTARA BERDASARKAN KONSEP VALUE FOR MONEY ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE MEASUREMENT OF THE NORTH SULAWESI PROVINCIAL GOVERNMENT BASED ON THE CONCEPT OF VALUE FOR MONEY, , 8 (4), 781–788.
- Retnowulan J. and Widiyanti W., 2018, Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Periode Tahun, *Widya Cipta*, 2 (2), 193–200. Terdapat di: <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/widyacipta>.
- Riama Anjelika Sinaga, 2021, *Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017 - 2019*, Terdapat di: <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/5315> [Diakses pada December 14, 2022].
- Rufit S.D. and Desmiwerita, 2020, ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR, *Pareso Jurnal*, 02
- Setianingrum R.D. and Haryanto, 2020, Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Tengah, *Diponegoro Journal of Accounting*, 9 (2), 1–15. Terdapat di: <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.
- Sinambela E. and Pohan K.R.A., 2016, ANALISIS KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA, *jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, Vol.16, 1–18.
- Sugiyono, 2016, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, *Alfabeta*, CV
- Sumual C.D., Kalangi L., Gerunggai N.Y., Akuntansi J., Sam Ratulangi U. and Kampus Bahu J., 2017, ANALISIS PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH KOTA TOMOHON,
- Susanto H., 2019, ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MATARAM,
- Yani A. and Zulkarnain Z., 2020, PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK,
- Zain W., *Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Value For Money pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng*,